

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

United Nations atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah organisasi multilateral yang secara resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, untuk menggantikan League of Nations atau LBB (Liga Bangsa-Bangsa). PBB lahir dengan semangat untuk mengakhiri Perang Dunia II. Negara-negara yang menjadi pendukung utama pembentukan organisasi dunia ini adalah mereka yang menang dalam perang tersebut, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, China, dan Rusia.<sup>1</sup>

Wight (1991:34) menegaskan bahwa piagam PBB dibentuk berdasarkan pada kepentingan dari negara-negara berkekuatan besar. Hal ini dapat dilihat dalam isi piagam PBB (1945) khususnya mengenai Dewan Keamanan PBB yang isinya adalah sebagai berikut:

Dewan Keamanan akan menentukan keberadaan setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan langkah-langkah apa yang diambil (ayat 39).....akan mengambil tindakan melalui udara, laut atau darat sebagaimana yang diperlukan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. (Ayat 42)

Karenanya, meski didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, PBB tetap tidak bisa lepas dari kepentingan negara-negara tersebut. Struktur organisasi ini juga dibentuk berdasarkan pandangan itu. Akibatnya, hanya negara-negara yang saat itu memiliki kekuatan politik, militer dan ekonomi yang diberi kesempatan untuk memainkan peran di kancah internasional. Berdasarkan hal itu pula, Sejak keruntuhan Blok Timur yang diwarnai dengan pecahnya Uni Soviet, berbagai negara mengajukan prakarsa perbaikan atau “reformasi”<sup>2</sup> pada struktur PBB. Dengan alasan bahwa efisiensi

---

<sup>1</sup> Sejarah Pembentukan PBB lihat: <http://www.un.org/aboutun/unhistory/>, hal.1, 04 April 2007

<sup>2</sup> Diplomatic Blue Book 2003: *Japanese Diplomacy and Global Affairs in 2002*, Published by The Ministry of Foreign Affairs; Japan, hal. 128-129

kinerja PBB hanya bisa diwujudkan dengan melakukan reformasi pada struktur organisasinya.

Masalah lain yang utama adalah soal perubahan struktur Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB adalah lembaga PBB yang paling penting. Berdasarkan prakarsa ini, anggota Dewan Keamanan akan ditambah dari 15 negara menjadi 24 negara. Akan tetapi perselisihan mengenai mekanisme pelaksanaan ide tersebut sampai saat ini belum selesai. Jerman, Jepang, India dan Brazil adalah empat negara yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak “veto”, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hanya saja masing-masing negara tersebut menghadapi penentangan dari negara-negara lain untuk duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Jepang mendapat penentangan dari China, Jerman dari Italia, India dari Pakistan dan Brazil dari negara-negara Amerika Latin.<sup>3</sup>

Berdasarkan usulan tersebut Jepang merupakan salah satu negara yang memberikan perhatiannya terhadap upaya reformasi dalam struktur PBB. Usulan Jepang untuk merubah reformasi pada struktur organisasi PBB sebenarnya telah dibahas sejak tahun 1992, hal ini kemudian ditegaskan oleh Perdana Menteri Jepang Hosokawa Morihiro dalam pidatonya di sidang umum PBB pada tahun 1993, yang mengatakan bahwa, “untuk mengadakan perubahan dunia secara menyeluruh, Jepang disiapkan untuk melakukan itu semua dengan tanggung jawabnya dalam upaya mempersatukan dan memperbaiki tatanan dunia.” Setahun kemudian Kono Yohei Wakil Perdana Menteri Jepang dan juga Menteri Luar Negeri Jepang, menyatakan, “Jepang telah disiapkan dan telah disahkan dengan banyak negara, untuk memegang tanggung jawab sebagai anggota yang permanen di Dewan Keamanan.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Akiko Fukushima, *Japanese Foreign Policy: The Emerging Logic of Multilateralism*, Published by Pelgrave Macmillan, New York, 1999, hal. 89-95

<sup>4</sup> Fujita Hiroshi, *Japan Quarterly*, Asahi Shimbun, *UN Reform and Japan's Permanent Security Council Seat* October-December, 1995, vol.XL II, no. 4

Sejumlah negara seperti Jerman, Brazil, Jepang dan India merasa berhak untuk tampil lebih menonjol di kancah dunia internasional dan sejajar dengan negara-negara seperti AS, Inggris dan Prancis. Untuk itu negara-negara ini bekerja keras menyuarkan reformasi PBB dan berupaya merebut kursi tetap di Dewan Keamanan. Dengan kata lain, reformasi PBB yang didengungkan oleh negara-negara ini tak lepas dari kepentingan mereka untuk bisa duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang merasa memiliki sejumlah kelebihan di atas negara-negara lain.

Jepang sudah lama mempunyai keinginan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi tidak menyatakan keinginannya dengan tegas. Baru pada permulaan tahun 1970, Jepang mulai menyiratkan keinginannya untuk merubah Dewan Keamanan PBB. Seperti yang diutarakan oleh Kiichi Aichi<sup>5</sup>, seorang Menteri Luar Negeri Jepang pada pidatonya di majelis umum PBB yang ke 26 tahun pada September 1971, yang mengusulkan bahwa “negara anggota seharusnya tidak mengesampingkan kemungkinan meninjau ulang piagam PBB yang menurut Aichi mekanismenya sudah ketinggalan jaman dan harus diperbaiki.”

S.L. Roy (145-148); mengatakan bahwa,

“PBB memiliki arti, sebagai suatu organisasi internasional yang permanen, yang keanggotaannya dianggap sebagai pengakuan status kedaulatan dan penerimaan yang universal sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa. Karena diplomasi PBB dilakukan didepan penglihatan umum, ia juga disebut sebagai “Diplomasi Publik”.

Untuk itu setiap negara menyadari arti pentingnya PBB sebagai lembaga publik sebagaimana yang dikatakan oleh Sir Thomas Hovet Jr (29-41) yang mengatakan bahwa, “yang mendasar bagi diplomasi jenis ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum”. Dengan menyadari arti penting PBB, semua negara berlomba untuk menjadikan PBB sebagai alat diplomasi, yang dapat digunakan untuk menunjukkan identitas suatu negara di lingkungan internasional.

---

<sup>5</sup>Akiko Fukushima, *op. cit*, hal.87

Keanggotaannya menjadi penting dan seberapa besar perannya di PBB dapat menentukan pula seberapa besar pengaruhnya di pergaulan internasional.

Sebagai bangsa yang pernah kalah di Perang Dunia II, Jepang mampu membuktikan pada seluruh dunia bahwa bangsanya mampu untuk segera bangkit dan membenahi segala kehancuran yang terjadi akibat perang. Kerja kerasnya mampu mensejajarkan Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, hal ini jugalah yang mendorong Jepang merasa layak untuk dapat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sebelum Perang Dunia ke-II berakhir Jepang adalah negara imperialis, yaitu negara dengan sistem kekaisaran, yang menjalankan paham fasisme seperti Jerman. Pada saat memasuki zaman modern saat ini, bagi Jepang untuk dapat sederajat dengan kekuatan Barat, Jepang harus memperluas kekuatannya di dunia internasional. Dengan menyadari hal itu Jepang perlu memberikan perhatian yang lebih pada kebijakan luar negerinya, terutama dalam upaya melibatkan diri terhadap permasalahan-permasalahan internasional.

Sejak tahun 1960 Jepang sudah dapat dikatakan bangkit kembali sebagai negara maju, tetapi dalam melaksanakan hubungan luar negerinya masih cenderung bersikap “*Low Profile*”. Di tahun 1970 dalam keadaan dunia yang semakin multipolar, yaitu banyak kubu dan sebagai akibatnya terjadi “krisis minyak”, Jepang merasa harus bersikap lebih aktif dalam melaksanakan hubungan internasionalnya. Jepang mulai memperlihatkan aktivitasnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di Organisasi internasional lainnya, juga tetap meneruskan kebijakan memperkuat posisinya di Asia dan Afrika.<sup>6</sup>

Takeshi Inoguchi dalam bukunya *Japan's International Relations* (1991: 18) mengatakan bahwa, setelah Perang Dunia ke-II berakhir, Jepang telah mengalami beberapa tahap perkembangan pada karakter politik luar negerinya, yaitu terdiri dari empat tahap:

1. *Leaders*, yaitu dimana Jepang menjalankan kebijakan luar negerinya dengan berusaha menjadi pemimpin di kawasan Asia, yang bertujuan untuk menjadi pemimpin dunia

---

<sup>6</sup> Abdul Irsan, 2005:101 *Politik Domestik Global dan Regional Jepang*, Makasar, Hasanuddin University Pers, 2005, hal. 101

2. *Dependency*, yaitu masa pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca kekalahannya pada Perang Dunia ke-II yang menghasilkan beberapa kerjasama dengan AS, sehingga Jepang menjalankan diplomasi aliansi dengan AS khususnya dalam kemiliteran.
3. *Free rider's*, yaitu masa dimana Jepang mulai menjalankan kebijakannya dengan memberikan perhatian penuh terhadap upaya peningkatan ekonominya untuk memperbaiki keadaan negaranya yang kalah pada Perang Dunia II, dan Jepang berupaya seminimal mungkin menghindari resiko yang mengundang pertentangan baik dari dalam maupun dalam hubungan luar negerinya,
4. *Supporter*, yaitu dimana Jepang mulai memainkan peranan yang penting dalam hubungan multilateralnya dan mulai ikut mendukung segala upaya yang dilakukan PBB, untuk memperkuat perannya di mata internasional.

Dengan perubahan kebijakan luar negeri Jepang yang berubah dari masa perang, setelah perang dan saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri setiap negara merupakan refleksi dari kepentingan politik dalam negeri itu sendiri.<sup>7</sup> Artinya bahwa pergeseran karakter politik luar negeri Jepang yang mengalami beberapa tahap perubahan merupakan sebuah refleksi dari perubahan kepentingan politik dalam negeri Jepang. Setelah menjadi negara pasifis dengan sikap agresi pada masa perang dunia, secara perlahan dan bertahap Jepang mengubah haluannya.

Perjalanan dari perubahan-perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang juga mencerminkan gambaran dari pola kebudayaan bangsa Jepang dalam menjalin hubungannya dengan negara-negara lain. Karena karakter-karakter sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat merupakan bagian dari nilai budaya yang berpengaruh terhadap pergaulan sesama manusia dan juga tentunya berpengaruh terhadap sikap suatu bangsa dalam menjalin hubungannya dengan bangsa lain. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Robert Jackson dan Sorensen (2005:37) yang mengatakan bahwa, “....sistem dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara

---

<sup>7</sup> Abdul, Irsan, *loc. cit.*

dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut”.

Dari dimulainya zaman restorasi Meiji sampai pecah Perang Dunia II Jepang selalu didominasi oleh kekuatan ekonomi dan militer. Memasuki abad 20 kemampuan Jepang dalam bidang ekonomi memang tidak diragukan lagi, selain Jepang berhasil menjadi pemberi anggaran terbesar di PBB, Jepang juga aktif memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara terkena bencana dan kepada negara-negara berkembang. Namun keterlibatannya terhadap konflik-konflik yang terjadi di dunia internasional mengalami hambatan semenjak Perang Dunia ke-II berakhir. Konstitusi 9 antara Jepang dan AS telah membatasi gerak Jepang di bidang keamanan internasional. Hal ini tentunya menghambat peran Jepang di kawasan internasional khususnya dalam permasalahan kemiliteran.

Hal ini ditegaskan oleh keinginan dari Departemen Luar Negeri Jepang atau *The Ministry of Foreign Affairs*<sup>8</sup> dalam bahasa Jepangnya disebut *Gaimusho*, yang telah berupaya untuk merevisi isi dari konstitusi 9 tersebut, menurutnya “Jepang perlu merevisi isi dari konstitusi 9 tersebut agar Jepang dapat berperan lebih aktif dalam upaya perdamaian internasional dan mengurangi ketergantungannya khususnya dalam kemiliteran.”

Hal ini juga dikemukakan oleh Ozawa Ichiro (1992:88) yaitu seorang sekretaris umum dari partai LDP yang mengatakan bahwa “Jepang seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih pada operasi perdamaian PBB, yaitu SDF harus dibentuk dan tersedia dalam melayani tuntutan PBB walaupun itu harus menyebar sampai ke luar negeri.”

Dengan menjadi anggota tidak tetap sebanyak 9 kali dari Dewan Keamanan PBB, ini merupakan kesempatan Jepang dalam memberikan suaranya di dunia internasional. Namun Jepang sangat menyadari dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan lebih memperkuat perannya di kawasan Asia. Seperti yang dikatakan oleh Koizumi yang mendesak reformasi PBB, dalam pidatonya di sidang umum PBB 2004. Menurutnya;

---

<sup>8</sup> Heinrich Jr, L. William, Akio Shibata and Yoshihide Soeya. *UN Peace Keeping Operations: A guide to Japanese Policies*. Tokyo, United Nations University Press, 1999., hal.1

“Tatanan dunia internasional saat ini sudah jauh berubah. Dunia membutuhkan perwakilan lebih banyak dari kawasan Asia dan Afrika. Dunia sudah mengalami perubahan selama 60 tahun terakhir. Asia dan Afrika yang dulu dijajah, kini menjadi pemain yang cukup penting dalam masyarakat global.”<sup>9</sup>

Usaha Jepang untuk ikut aktif dalam dunia internasional, adalah dengan membuktikan adanya perubahan citra Jepang dari negara agresi menjadi negara *peace loving country* yaitu negara cinta damai yang tidak ingin lagi terlibat dalam peperangan. Hal ini coba dibuktikan Jepang di dalam isi pembukaan konsitusi Jepang yang menetapkan tiga prinsip dasar yaitu:<sup>10</sup>

1. Kedaulatan rakyat;
2. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
3. Cinta damai.

Untuk mengupayakan terciptanya politik luar negeri yang lebih aktif dalam menangani permasalahan internasional, Jepang merubah haluan politik luar negerinya menjadi lebih aktif terhadap segala kebijakan PBB sebagai taktik diplomasi Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Upaya Jepang menerapkan politik luar negerinya dengan menjadi lebih aktif tersebut berarti Jepang harus terus menerus mendukung langkah-langkah dan kebijakan positif dunia dengan ikut serta dan berperan aktif dalam memberikan bentuk nyata pada dunia internasional. Seperti yang dikatakan oleh Takeshi Inoguchi:

<sup>9</sup> Japan Echo, *Japan and United Nation*, February, 2005, hal. 46

<sup>10</sup> Ozawa Ichiro, *Blue Print Jepang Masa Depan*, Jogjakarta, PT.Tiara Wacana Yogya, 1995, hal. 90

*“between the extremes of Japan as challenger and free rider is Japan as supporter, this means that Japan should contribute to strengthening of the peace, and Japan must continue to make steady progress in the liberalization of both trade and capital markets, as well as taking an active part in making foreign aid and overseas direct investment, syndicated loans, Eurobond issues, and contributions to international organizations, using its high technology and excess capital”.*<sup>11</sup>

Bagaimanapun, upaya untuk memperluas jumlah anggota tetap Dewan Keamanan dan untuk mendukung Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB menghadapi suatu kemunduran, terutama diakibatkan oleh adanya pendudukan Soviet-Afganistan yang terjadi pada tahun 1979-1989, Yang merusak upaya perdamaian yang ingin diciptakan dunia. Kelima anggota tetap DK-PBB memveto banyak dari resolusi dan upaya untuk merestrukturisasi Dewan Keamanan untuk menambah kursi tetap untuk Jepang seperti halnya negara Jerman, terhalang lagi di tahun 1990an.<sup>12</sup>

Dengan begitu dalam penulisan ini penulis ingin melihat apa saja faktor yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga keinginannya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Selanjutnya mengkaji apa saja langkah-langkah yang dilakukan Jepang di PBB, yaitu bagaimana upaya-upaya nyata yang dilakukan Jepang agar kepentingan diplomasi yang diperjuangkan oleh Jepang di PBB dapat tercapai.

<sup>11</sup> Takeshi Inoguchi, *Japan's International Relations*, London, Pinter Publisher, 1991, hal.10

<sup>12</sup> Fajari Iriani Sophiaan Yudoyoko, Jun Honna, Meidi Kosnadi, *Dinamika Hubungan Sipil Militer dalam Sistem Politik Jepang*, Depok, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (PSJ-UI), 2006. hal.80

## **1.2 Permasalahan**

Penelitian ini merupakan penelitian kajian terhadap alasan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai upaya diplomasi dalam hubungannya dengan dunia internasional. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu ingin mengkaji apa saja yang menjadi alasan yang mendasari keinginan Jepang sehingga keanggotaan tetap Jepang di Dewan Keamanan PBB menjadi begitu penting, alasan tersebut dilihat melalui sudut pandang budaya dan politik Jepang. Penelitian ini juga melihat upaya-upaya Jepang dan kontribusi yang dilakukan Jepang di PBB sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban Jepang di dunia internasional, dan dalam upayanya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya-upaya tersebut khususnya dilihat melalui diplomasi ekonomi melalui salah satu instrumennya yaitu ODA dan juga melalui peranan militer Jepang yaitu SDF dari tahun 1990an. Dimana ODA dan SDF merupakan bentuk upaya diplomasi damai Jepang di PBB.

## **1.3 Tujuan dan Cakupan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud ingin menunjukkan apa alasan yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yaitu dilihat melalui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut, upaya pendekatan diplomasi apa saja yang digunakan Jepang untuk memperoleh dan melindungi kepentingan yang sesuai dengan harapan negaranya.

Penelitian ini dibatasi pada masa setelah Perang Dunia ke-II yaitu khususnya pada masa 1990-an di mana kontribusi Jepang di PBB yaitu melalui kontribusi ekonomi ODA dan militer SDF mulai diperhitungkan sampai sekarang. Kajian ini meliputi bentuk diplomasi Jepang di lingkungan internasional khususnya dalam menjalankan politik luar negerinya sebagai upaya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bagaimana upaya-upayanya dan apa saja faktor budaya dan politik yang mendasari Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

#### 1.4 Kemaknawian Penelitian

Penelitian mengenai alasan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan menggunakan teori politik luar negeri dan teori diplomasi multilateral melalui PBB ini, berupaya untuk menggambarkan serta mengungkapkan pandangan pembaca tentang suatu gejala yang terjadi dalam politik luar negeri Jepang sebagai upaya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan penelitian interdisipliner seperti budaya diplomasi terutama yang berhubungan dengan Jepang.

Penelitian ini akan dapat dikembangkan oleh para pemerhati dan peminat dalam kajian diplomasi budaya Jepang untuk memaparkan pelbagai hal yang tercermin dalam upaya diplomasi yang dilakukan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai hasil pemaknaan pembaca.

#### 1.5 Kerangka Teori

Christopher Hill (2003:3) mengatakan politik luar negeri adalah, “.” (*The sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international relation*”. (Yaitu sejumlah hubungan eksternal yang diselenggarakan secara resmi oleh pelaku independen (biasanya adalah sebuah negara) dalam hubungan internasional, dan isi dari kegiatan politik luar negeri yaitu “meliputi segala kegiatan politik seperti aksi-aksi, pernyataan-pernyataan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan bagaimana upaya pelaku atau aktor untuk mencapai sasarnya dan membentuk pandangan dunia luar.”

Jepang sendiri telah mengalami perkembangan dalam politik luar negerinya dan perubahan itu merupakan bentuk refleksi dari kepentingan yang ada di dalam negeri Jepang sendiri. Khususnya ketika Jepang mulai memusatkan politik luar negerinya di dalam organisasi internasional PBB, Jepang mulai mengubah politik luar negerinya menjadi lebih aktif. Seperti yang dikemukakan oleh Takeshi Inoguchi (1991:10) bahwa;

*“between the extremes of Japan as challenger and free rider is Japan as supporter, this means that Japan should contribute to strengthening of the peace, and Japan must continue to make steady progress in the liberalization of both trade and capital markets, as well as taking an active part in making foreign aid and overseas direct investment, syndicated loans, Eurobond issues, and contributions to international organizations, using its high technology and excess capital”.*

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Jepang tidak lepas dari adanya faktor-faktor budaya yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Faktor budaya yang menggerakkan dan mengatur pola hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat, juga akhirnya berkembang menjadi faktor yang mendasari budaya politik suatu bangsa. Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam *Introduction to International Relations* edisi terjemahan (2005; 37), mengatakan bahwa, “sistem negara merupakan lambang sejarah, yang dibentuk oleh masyarakat setempat, artinya sistem dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut.”

Mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara Robert Jackson dan Georg Sorensen (2005: 206) juga menjelaskan bahwa, “negarawan memiliki kewajiban luar negeri yang berasal dari keanggotaan negaranya dalam masyarakat internasional, yang melibatkan hak dan kewajiban seperti yang ditentukan oleh hukum internasional.” Disini berarti negara merupakan suatu kesatuan yang menegaskan kedaulatan eksternal satu sama lain melalui praktik pengakuan, diplomasi, perjanjian internasional, perdagangan dan seterusnya.

S.L. Roy (1991:23), mengatakan bahwa

“Di dalam dunia yang terdiri dari negara yang berdaulat ada dua faktor yang paling penting dalam upaya pemeliharaan dunia yaitu diplomasi dan hukum internasional. Di samping hukum internasional telah memberikan tatanan bagi dunia internasional, bagi pemeliharaan perdamaian diplomasi telah berperan sebagai pemelihara keseimbangan dalam tatanan internasional.”

Seperti juga yang dikatakan oleh Morgenthau, yaitu bahwa “suatu pr-kondisi bagi penciptaan dunia yang damai adalah berkembangnya konsensus internasional yang memungkinkan diplomasi mendukung terciptanya perdamaian.”<sup>13</sup>

Diplomasi itu sendiri menurut Sir Earnest Satow (1957:3), dalam bukunya “*Guide to Diplomatic Practice*”, adalah “*The application of intelligence and tact to conduct official relations between the government of independent state*” (terjemahan: penerapan kepandaian dan taktik untuk pelaksanaan hubungan-hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat). Dalam prakteknya, kepandaian dan taktik dalam diplomasi tersebut diterapkan untuk melindungi kepentingan negara yang bersangkutan.

Menurut G.R. Berridge (2005:1) diplomasi memiliki pengertian sebagai berikut;

*“Diplomacy is an essentially political activity and, well resourced and skilful, a major ingredient of power. Its chief purpose is to enable states to secure the objectives of their foreign policies... diplomacy consists of communication between officials designed to promote foreign policy either by formal agreement or tacit adjustment”.*

Pola interaksi hubungan antar negara-negara berdaulat akan menghasilkan komunikasi antar negara yang memiliki sifat saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Talcott Parsons, seorang tokoh teori sistem tindakan mengemukakan pola interaksi tindakan yang terjadi dalam hubungan internasional dapat dianalisis melalui tiga tingkatan yaitu:<sup>14</sup>

1. Ideosinkratik (perorangan atau kelompok tertentu yang dipimpinnya, dilihat dari bagaimana kaitan dan implikasinya terhadap kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional;

<sup>13</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, hal.23

<sup>14</sup> Drs.T.May Rudy, SH., MIR, M.Sc, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 14

2. Negara atau bangsa, yaitu bagaimana peran dan posisi bangsa itu dalam kerjasama internasional serta percaturan politik dan ekonomi internasional;
3. Sistem internasional baik regional maupun global, di mana ketiga tingkatan tersebut berasal dari orientasi nilai, lambang-lambang, kepercayaan, sistem sosial, dan struktur kebudayaan.

Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:

*“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.”*

Terjemahan: Pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.<sup>15</sup>

Organisasi internasional merupakan bentuk dari Diplomasi multilateral atau parlementer yang juga disebut sebagai diplomasi organisasi. Bentuk negosiasi antar bangsa ini mempunyai keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh diplomasi model lama yang dilakukan secara bilateral. Bentuk parlementer diplomasi multilateral ini muncul sesudah Perang Dunia II dalam bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bentuk parlementer dari diplomasi multilateral, sebagaimana menurut konotasi, biasanya mengikuti prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan oleh badan legislatif dari negara-negara demokrasi, seperti debat umum, pemungutan suara, laporan komisi dan sebagainya.<sup>16</sup> Sir Thomas Hovet Jr (29-41) mengatakan, “bahwa yang mendasar bagi diplomasi jenis ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum”.

Organisasi-organisasi Internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Peter Toma dan Robert F. Gorman (1991:

<sup>15</sup> Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr, *Organizing for Peace: International Organization in World Affairs*, Houghton Mifflin Co, Boston, New York, 1967: 6

<sup>16</sup> S.L. Roy, *op. cit.*, hal. 146-148

250-251), menjelaskan mengenai fungsi dari organisasi internasional sebagai berikut:

1. Saluran untuk kontak diplomatik secara berkesinambungan.
2. Pencegahan dan pengendalian konflik antar negara anggota.
3. Fasilitator bagi interaksi ekonomi antar negara anggota.

Sedangkan tujuan dari diplomasi dijelaskan oleh Kautilya<sup>17</sup> yang menekankan empat hal yang dapat diperoleh melalui diplomasi, yaitu *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (pembagian yang adil).

Dalam tesis ini, kerangka teori yang akan dipakai sebagai acuan dalam mengamati dan mengkaji kenyataan-kenyataan yang ada adalah teori S.L Roy<sup>18</sup> mengenai diplomasi dan diplomasi organisasi yang akan digunakan untuk melihat dan mengkaji upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dalam upaya diplomasi internasional, yaitu dimana menurut S.L Roy diplomasi dapat diartikan sebagai cara untuk mempengaruhi potensi-potensi negara setempat yang dapat dimanfaatkan oleh para diplomat untuk keperluan memperoleh dan melindungi kepentingan negaranya. Cara untuk mempengaruhi pihak lain tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai cara pendekatan diplomasi, sedangkan untuk memperlancar pendekatan tersebut, instrument diplomasi seperti bantuan, kerjasama organisasi internasional dan lain-lain dapat mempercepat tercapainya tujuan diplomasi tersebut.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1. Latar dan sasaran Penelitian

Latar dan sasaran dalam penelitian ini yaitu; masyarakat Jepang khususnya kementerian luar negeri, para diplomat, Perdana Menteri Jepang yang digunakan sebagai latar dalam penelitian ini, sedangkan sebagai sasaran dalam penelitian ini adalah upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebagai upaya diplomasi.

---

<sup>17</sup> *ibid*, hal 16

<sup>18</sup> *ibid*, hal. 7

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu studi pustaka yang berupa: buku-buku ilmiah, artikel-artikel dan karya ilmiah, ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan politik luar negeri Jepang khususnya yang menyangkut kontribusi Jepang di PBB, pidato-pidato Perdana Menteri, Dubes, Menteri Luar Negeri Jepang serta bahan-bahan lain yang relevan.

### 1.6.3. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskripsi analisis. Penelitian deskripsi analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian berdasarkan data yang sangat dipercaya.<sup>19</sup> Data penelitian yang dikumpulkan dan dianalisa dengan tehnik deskriptif analisis ini untuk dapat menghasilkan analisa yang mendalam terhadap pemahaman mengenai alasan-alasan yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap dewan Keamanan PBB dan juga upaya-upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebagai upaya diplomasi dalam hubungan internasional. Sedangkan sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Selanjutnya dalam penulisan ini dibagi ke dalam Lima Bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I akan membahas mengenai pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum berupa latar belakang masalah, permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian, pendekatan dan metodologi penelitian, kerangka teori serta sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> John W Creswell, *Research Design*, 1994

Bab II membahas tentang gambaran umum tentang Jepang dan PBB dilihat dari sejarah berdirinya PBB, tujuan dan arti penting diplomasi PBB, dan sejarah keterlibatan Jepang di PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Bab III membahas mengenai faktor-faktor budaya dan politik apa yang mendasari keinginan Jepang menjadi anggota tetap di Dewan Keamanan PBB

Bab IV. membahas mengenai upaya-upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu dilihat melalui upaya diplomasi ekonomi khususnya melalui salah satu dari instrumen ekonomi yaitu bantuan luar negeri ODA dan kontribusi SDF melalui PKO, dan membahas tentang apa saja kontribusi Jepang di PBB dilihat dari keterlibatannya di PKO dan ODA yang merupakan bentuk dari upaya diplomasi damai Jepang di PBB. Upaya diplomasi Jepang di PBB ini juga ditopang dengan pernyataan-pernyataan dari pihak kementerian luar negeri Jepang, Perdana Menteri Jepang dan lainnya.

Bab V kesimpulan dan penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan mengenai masalah-masalah yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya.